



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN SINGKAT
KOMISI V DPR RI

(BIDANG PERHUBUNGAN, PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN RAKYAT,
PEMBANGUNAN PEDESAAN DAN KAWASAN TERTINGGAL, BADAN METEOROLOGI,
KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA, BADAN NASIONAL PERTOLONGAN DAN
PENCARIAN/BASARNAS)

Tahun Sidang	: 2024 – 2025
Masa Sidang	: I
Rapat	: Ke – 17
Jenis Rapat	: Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat
Hari/Tanggal	: Senin, 9 September 2024
Sifat	: Terbuka
Pukul	: 13.30 WIB s.d 14.45 WIB
Tempat	: Ruang Rapat Komisi V (Ruang KK V) Gedung Nusantara DPR RI.
Acara	: Penetapan Hasil Pembahasan RKA K/L TA 2025 Mitra Kerja Komisi V DPR RI dalam RAPBN TA 2025.
Ketua Rapat	: Lasarus, S.Sos.,M.Si
Sekretaris	: Nunik Prihatin Budiastuti, S.H
Hadir Anggota	: ... dari 55 orang Anggota Komisi V DPR RI.
Hadir Mitra	: Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Menteri Perhubungan, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi dan Meteorologi, dan Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan/Basarnas beserta jajaran.

KESIMPULAN/KEPUTUSAN RAPAT

I. PENDAHULUAN

1. Rapat dibuka pada pukul 13.30.WIB setelah kuorum terpenuhi dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.
2. Ketua Rapat menyampaikan bahwa agenda Rapat Kerja/Rapat Dengar Pendapat Komisi V DPR RI dengan Semua mitra Kerja Komisi V DPR RI pada hari ini adalah membahas Penetapan Hasil Pembahasan RKA K/L TA 2025 Mitra Kerja Komisi V DPR RI dalam RAPBN TA 2025.
3. Ketua Rapat mempersilakan kepada Anggota Komisi V DPR RI untuk menyampaikan tanggapannya terhadap jawaban pertanyaan yang telah disampaikan oleh mitra kerja Komisi V DPR RI dalam rangkaian pembahasan anggaran Tahun 2025.
4. Ketua Rapat mempersilakan kepada masing-masing fraksi untuk menyampaikan tanggapannya terhadap rincian program dan alokasi anggaran Kementerian dan Lembaga/Badan mitra Kerja Komisi V DPR RI dalam RAPBN Tahun Anggaran 2024.

II. KESIMPULAN/KEPUTUSAN RAPAT:

1. Komisi V DPR RI dapat menyetujui pagu anggaran Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; Kementerian Perhubungan; Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi; Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika; dan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan/ BASARNAS sesuai dengan Nota Keuangan RAPBN TA 2025 sebagai berikut:

Dalam ribu rupiah

NO	KEMENTERIAN/ LEMBAGA/ UNIT KERJA/ PROGRAM	PAGU KEBUTUHAN TA 2025	NOTA KEUANGAN RAPBN TA 2025	SELISIH
		A	B	A-B
1.	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	136.944.971.043	75.632.263.316	61.312.707.727
a.	Sekretariat Jenderal	528.443.118	528.443.118	-
b.	Inspektorat Jenderal	98.911.139	98.911.139	-
c.	Ditjen Bina Marga	54.509.009.983	32.312.579.377	22.196.430.606
d.	Ditjen Cipta Karya	23.200.245.606	10.482.438.331	12.717.807.275
e.	Ditjen Sumber Daya Air	45.425.934.841	26.534.770.663	18.891.164.178
f.	Ditjen Perumahan	12.034.985.813	4.527.680.145	7.507.305.668
g.	Ditjen Bina Konstruksi	558.368.494	558.368.494	-
h.	Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah	92.795.782	92.795.782	-
i.	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	347.315.335	347.315.335	-
j.	Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	148.960.932	148.960.932	-

2.	Kementerian Perhubungan	80.638.966.701	24.765.974.503	55.872.992.198
a.	Sekretariat Jenderal	1.317.816.614	681.310.345	636.506.269
b.	Inspektorat Jenderal	165.655.008	116.183.787	49.471.221
c.	Ditjen Perhubungan Darat	18.142.789.810	4.256.936.928	13.885.852.882
d.	Ditjen Perhubungan Laut	19.607.809.162	10.379.079.837	9.228.729.325
e.	Ditjen Perhubungan Udara	18.210.560.057	4.570.615.374	13.639.944.683
f.	Ditjen Perkeretaapian	14.219.264.790	1.798.272.631	12.420.992.159
g.	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan (BPSDMP)	7.495.324.317	2.722.893.840	4.772.430.477
h.	Badan Kebijakan Transportasi	499.398.318	108.575.015	390.823.303
i.	Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek	980.348.624	132.106.746	848.241.878
3.	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi	4.379.570.000	2.314.806.849	2.064.763.151
a.	Sekretariat Jenderal	315.750.000	302.217.909	13.532.091
b.	Inspektorat Jenderal	46.550.000	29.426.946	17.123.054
c.	Badan Pengembangan dan Informasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	168.500.000	63.286.225	105.213.775
d.	Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan	484.940.000	98.414.161	386.525.839
e.	Direktorat Jenderal Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	523.500.000	66.259.996	457.240.004
f.	Direktorat Jenderal Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal	120.050.000	60.868.508	59.181.492
g.	Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi	670.280.000	98.612.147	571.667.853
h.	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	2.050.000.000	1.595.720.957	454.279.043

4.	BMKG	4.057.987.780	2.801.897.302	1.256.090.478
a.	Program Dukungan Manajemen	1.376.958.286	1.324.601.800	52.356.486
b.	Program Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika	2.681.029.494	1.477.295.502	1.203.733.992
5.	BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN/ BASARNAS	3.711.935.726	1.497.578.812	2.214.356.914
a.	Program Dukungan Manajemen	1.278.195.917	855.539.600	422.656.317
b.	Program Pencarian dan Pertolongan pada Kecelakaan dan Bencana	2.433.739.809	642.039.212	1.791.700.597

2. Komisi V DPR RI bersama Kementerian PUPR; Kementerian Perhubungan; Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi; BMKG; dan BNPP/Basarnas sepakat untuk melakukan sinkronisasi anggaran menurut fungsi dan program dalam RAPBN TA 2025 sesuai dengan saran, masukan serta usulan Komisi V DPR RI.
3. Komisi V DPR RI akan memperjuangkan usulan penambahan anggaran TA 2025 sesuai dengan mekanisme pembahasan RUU tentang APBN TA 2025 di DPR RI, sebagai berikut:
 - a. Kementerian PUPR sebesar Rp. 61,31 Triliun.
 - b. Kementerian Perhubungan sebesar Rp. 55,87 Triliun.
 - c. Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi Rp. 2,06 Triliun.
 - d. BMKG sebesar Rp.1,256 Triliun.
 - e. BNPP/ Basarnas Rp. 1,19 Triliun.

III. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 14.45.WIB.

Jakarta, 9 September 2024

KETUA RAPAT,

ttd

L A S A R U S

**MENTERI PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN RAKYAT,**

ttd

M. BASOEKI HADIMOELJONO

**KEPALA BADAN METEOROLOGI
KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA,**

ttd

DWIKORITA KARNAWATI

MENTERI PERHUBUNGAN

ttd

BUDI KARYA SUMADI

**KEPALA BADAN NASIONAL
PENCARIAN DAN PERTOLONGAN,**

ttd

K U S W O R O

**MENTERI DESA, PDT,
DAN TRANSMIGRASI,**

ttd

ABDUL HALIM ISKANDAR